

**STRATEGI KOMUNIKASI DINAS SOSIAL,P3A KABUPATEN
PONOROGO DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH)**

SKRIPSI



Oleh

Hafidz Muhammad Reza

NIM. 302190086

Pembimbing

Muhamad Nurdin M.Ag.

NIP. 197604132005011001

**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO**

P O N O R O G O
2023

ABSTRAK

Hafidz Muhammad Reza. 2023.*Strategi Komunikasi Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH).* Skripsi. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Muhammad Nurdin M,Ag.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi , Kesejahteraan Sosial , Kemiskinan

Strategi komunikasi yang efektif diperlukan oleh institusi pemerintah saat menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo memerlukan strategi komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi tentang program-program yang tersedia kepada masyarakat miskin dan mencapai target pencapaian yang optimal, terutama pada bidang Bantuan dan Jaminan Sosial yang menjadi prioritas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi yang digunakan oleh Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ponorogo melalui Program Keluarga Harapan (PKH) serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi program PKH di Kabupaten Ponorogo.

penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami strategi komunikasi Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan. Data-data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Uji keabsahan data dilakukan untuk memastikan keakuratan dan keandalan temuan penelitian.

Hasil strategi komunikasi Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) terlihat berhasil. Strategi komunikasi yang efektif, seperti mengenali khalayak, menyusun pesan yang tepat, menetapkan metode komunikasi, memilih media yang sesuai, dan memainkan peran komunikator yang kredibel, telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PKH. Pertemuan dengan calon penerima manfaat, sosialisasi melalui media sosial dan surat kabar lokal, kerja sama dengan relawan, dan penyelenggaraan pelatihan keterampilan menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Meskipun masih ada tantangan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa akses ke media sosial, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan strategi komunikasi agar lebih efektif dalam mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui program PKH.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAQWAH
Alamat: Jl. Puspita Jaya, Desa Pintu, Jenangan, Ponorogo 63492
Website: <http://fuad.iainponorogo.ac.id> Email: fuad@iainponorogo.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Hafidz Muhammad Reza
NIM : 302190086
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul : Strategi Komunikasi Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Melalui
Program Keluarga Harapan (PKH)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 08 Mei 2023

Mengetahui,

Menyetujui,

Kajur

Pembimbing



Kayyisatri Ajhuri, M.A.
NIP. 19830672015031004

Muhammad Nurdin M.Ag.
NIP. 197604132005011001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
PENGESAHAN

Nama : Hafidz Muhammad Reza

NIM : 302190086

Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul : Strategi Komunikasi Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Senin

Tanggal : 22 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Komunikasi dan Penyiaran Islam (S.Sos) pada:

Tim penguji :

1. Ketua Sidang : Muchlis Daroini, M.Kom.I

2. Penguji I : Asna Istya Marwantika, M.Kom.I

3. Penguji II : Muhamad Nurdin M,Ag.

Ponorogo, 28 Mei 2023
Mengesahkan,
Dekan,
Dr. Ahmed Munir, M.Ag
NIP. 196806161998031002

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hafidz Muhammad Reza

NIM : 302190086

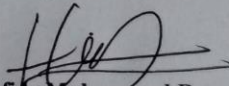
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Judul : Strategi Komunikasi Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini dipergunakan semestinya.

Ponorogo 8 Juni 2023


Hafidz Muhammad Reza
NIM. 302190086



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
FAKULTAS UHULUDDIN, ADAB, DAN AKWAH
Alamat: Jl. Puspita Jaya, Desa Pintu, Jenangan, Ponorogo 63492
Website: <http://fuad.iainponorogo.ac.id> Email: fuad@iainponorogo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafidz Muhammad Reza

NIM : 302190086

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini dengan judul Strategi Komunikasi Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan hasil karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan sumber aslinya berupa tanda kutipan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 08 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Hafidz Muhammad Reza

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya strategi komunikasi memiliki peranan penting di dalam suatu proses kegiatan. Dalam institusi pemerintah, strategi komunikasi sangat dibutuhkan saat proses penyampaian pesan dan gagasan atau ketika proses penyuluhan program-program yang hendak dicanangkan dari pemerintah untuk masyarakat. Fungsi dari institusi pemerintah sebagai wadah aspirasi masyarakat, menjadikan institusi pemerintah ini harus dapat melakukan komunikasi dua arah (*two ways communication*) secara benar dan efektif. Hal ini dimaksudkan agar informasi dan pesan yang hendak diberikan kepada masyarakat dapat diserap secara baik sehingga tidak terjadi kesalah-artian dalam komunikasi (*miss communication*).¹

Fungsi dari komunikasi dikategorikan menjadi 4 (empat) yaitu sebagai komunikasi sosial, sebagai komunikasi ekspresif, sebagai komunikasi ritual dan sebagai komunikasi instrumental dimana tujuan umum dari komunikasi instrumental ini untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, menggerakkan tindakan dan juga menghibur. Komunikasi yang efektif terhadap masyarakat dapat dilihat dari adanya feedback atau respon terhadap pesan yang disampaikan oleh pemerintah sebagai komunikator, baik melalui perantara seperti media ataupun tanpa perantara (secara langsung).

1. Anwar Arifin, *Strategi komunikasi sebuah pengantar ringkas* (CV. Armico. Bandung: 1984), 32.

Komunikasi merupakan suatu proses dimana 2 (dua) orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.²

Pada saat pemerintah mensosialisasikan program-programnya, penetapan strategi komunikasi sangat diperlukan. Akan tetapi sebelum mengimplementasikan strategi komunikasi, langkah awal yang harus dilaksanakan terlebih dahulu ialah dengan perencanaan komunikasi. Sebab perencanaan komunikasi dimaksudkan untuk mengatasi rintangan-rintangan yang ada ketika proses strategi komunikasi guna mencapai efektivitas komunikasi. Perencanaan komunikasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan kontinu dalam mengorganisasi aktivitas manusia terhadap upaya penggunaan sumber daya komunikasi secara efisien guna merealisasikan kebijakan komunikasi. Strategi komunikasi sangat dibutuhkan dalam proses komunikasi, guna meminimalisir adanya miss communication pada saat mensosialisasikan program pemerintah. Strategi Komunikasi ialah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai 3 pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.³

Dinas Sosial adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial. Keberhasilan yang telah dicapai oleh Dinas Sosial, bahwa

² Erika B. Situmorang, Dkk, *MPOT Implementasi Manajemen Rumah Sakit* (PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan: 2022), 62.

³ Ibid.

pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2012 dapat terwujud dengan target yang baik dan saat ini program yang berjalan untuk tahun 2023 diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan target pencapaian Dinas Sosial, P3A Kabupaten, memiliki 4 (empat) bidang dalam melayani berbagai kebutuhan masyarakat. Dimana 4 (empat) bidang tersebut ialah bidang Pemberdayaan Sosial, bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bidang Bantuan dan Jaminan Sosial serta bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Dari ke 4 (empat) bidang tersebut, yang menjadi prioritas Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo saat ini yaitu

Bidang bantuan dan Jaminan Sosial. berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2021, orang miskin di Bumi Rejog mencapai 86.940 jiwa, Tingkat kemiskinan periode Maret 2020 sampai maret 2021 jumlah penduduk miskin bertambah 3.210, sehingga total mencapai 86.940 jiwa pada maret 2021 atau meningkat 3,72 %⁴ Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ponorogo, Dinas Sosial perlu memiliki strategi komunikasi yang efektif. Hal ini penting karena komunikasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program atau kebijakan. Dengan komunikasi yang baik, Dinas Sosial dapat menyampaikan informasi tentang program-program yang tersedia kepada masyarakat miskin, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kemiskinan di daerah tersebut.

⁴ Badan Pusat Statistik, *Laporan Kemiskinan di kabupaten ponorogo*, (Badan pusat statistik ponorogo:2021)

Hari ini fakta telah membuktikan bahwa kemiskinan yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan dan menjadi momok kesejahteraan bagi masyarakat. Hal itu terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia termasuk Karesidenan Madiun khususnya Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban dalam mengentaskan kemiskinan di wilayahnya agar masyarakatnya sejahtera. Komunikasi merupakan bagian yang erat hubungannya dengan sisi pemberdayaan masyarakat. Pengenalan dan penetapan khalayak merupakan elemen penting dari rangkaian perencanaan suatu kampanye⁵ komunikasi. Tanpa adanya khalayak yang jelas, maka Dinas Sosial tidak mampu menemukan metode dan teknik yang tepat untuk melancarkan kampanyenya. Sebagai bagian dari pemerintah, Dinas Sosial mengemban tugas besar dalam menuntaskan kemiskinan. Peranan dari pemerintah

Melihat keadaan masyarakat miskin, termasuk masyarakat yang ada di kabupaten Ponorogo, maka pemerintah sebagai lembaga yang berwenang memiliki tanggungjawab besar dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tanggungjawab pemerintah sesuai dengan bunyi Pancasila yang kelima yakni “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan dengan dasar ini, lembaga pemerintah bertanggungjawab memenuhi tuntutan hidup sebagian besar masyarakat sebagai warga negara yakni penerapan terhadap Undang-undang pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal ini menjadi cerminan begitu besarnya tanggung

⁵ M. Linggar Anggoro, *Teori dan Profesi Kehumasan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), 24.

jawab negara Indonesia terhadap perbaikan hidup rakyat negeri ini. Penanganan masalah kemiskinan merupakan masalah serius yang harus dipikirkan matang-matang jalan keluarnya. Penerapan program kemasyarakatan pun harus dilakukan secara tepat, merata dan betul-betul menjangkau masyarakat miskin, sebab keputusan dari pemerintah, termasuk penerapan programnya, sangatlah menentukan nasib masyarakat, apakah akan terbebas dari kemiskinan ataukah justru memperparah kemiskinan yang dialami masyarakat.

Dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan di daerah tersebut, Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo memberikan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat miskin. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis⁶.

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program

⁶ Direktorat Perlindungan Sosial Keluarga, *Kementerian Sosial RI, (PKH: Sebuah Pemutakhiran Program Perlindungan Sosial di Indonesia)*, 1.

perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini tertarik untuk memfokuskan analisisnya pada *strategi komunikasi Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH)*

IAIN
PONOROGO

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan dan untuk membatasi wilayah penelitian sesuai dengan uraian latar belakang penelitian diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yang digunakan agar fokus penelitian terarah dan peneliti mempunyai pedoman dalam melakukan penelitian. Adapun pertanyaan yang muncul dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana strategi komunikasi Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ponorogo melalui Program Keluarga Harapan (PKH) ?
2. Bagaimana hasil strategi komunikasi yang digunakan oleh Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam Program PKH ?
3. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi strategi komunikasi PKH di Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ponorogo melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

2. Untuk menganalisis hasil strategi komunikasi yang digunakan oleh Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam program PKH
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi strategi komunikasi PKH di Kabupaten Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan menerapkan strategi komunikasi yang tepat, Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo dapat meningkatkan efektivitas program PKH. Hal ini dapat menjadi contoh baik dalam penerapan teori komunikasi dalam praktek nyata dan dapat dijadikan acuan untuk institusi atau organisasi lain yang ingin meningkatkan efektivitas program mereka melalui strategi komunikasi.
- b. Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji masalah yang sama atau berkaitan

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi Dinas Sosial untuk meningkatkan efektivitas strategi komunikasinya. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi Dinas Sosial tentang bagaimana

cara meningkatkan efektivitas strategi komunikasinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ponorogo.

- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial dalam mengelola program-program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Penelitian ini dapat mengungkap bagaimana cara Dinas Sosial menyampaikan informasi tentang program-program yang tersedia kepada masyarakat miskin, serta bagaimana cara Dinas Sosial meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kemiskinan di daerah tersebut.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti juga meninjau hasil dari beberapa skripsi lainnya yang berkaitan dengan judul yang akan penulis teliti. Dalam mencari referensi untuk membuat skripsi, adapun penelitian yang berhubungan dengan judul skripsi peneliti yaitu :

Pertama Skripsi berjudul "*Strategi Komunikasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kec Kabat Kab. Banyuwangi*" Oleh Mar'atus Sholihah mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Jember Tahun 2016⁷, yang menjelaskan bahwa Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Banyuwangi yaitu menjalankan salah satu program dari

⁷ Mar'atus Sholihah, *Strategi Komunikasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kec Kabat Kab. Banyuwangi*, (iain jember:2016)

pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan yakni dengan mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah untuk mengetahui strategi komunikasi yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, Sedangkan perbedaan penelitian Mar'atus Sholihah dengan penelitian yang akan diteliti penulis terletak pada apa yang menjadi fokus penelitian. Pada Skripsi Mar'atus Sholihah terfokus pada mekanisme Dinsosnakertan menjalankan PKH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten ponorogo

Kedua Skripsi berjudul "*Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Tamangapa Kecamatan Menggala*" Oleh Andi Nurhikmawati Mahasiswa Ilmu komunikasi Tahun 2015 UIN Alauddin Makassar⁸ yang menjelaskan bahwa langkah-langkah komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Makassar pada dasarnya adalah proses yang dilakukan secara tidak langsung. Yakni dengan cara menentukan khalayak, menyusun pesan dengan bantuan Yayasan Pabbata Umami, menggunakan metode edukasi atau disini Dinas Sosial berperan memonitoring masyarakat miskin agar mereka terarah, dan kemudian terakhir yakni

⁸Andi Nurhikmawati, *Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Tamangapa Kecamatan Menggala* (UIN Alauddin Makassar: 2015)

menyeleksi media yang cocok digunakan untuk sebuah publikasi Dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Sosial juga terdapat faktor-faktor penghambat yang dapat menjadi penghalang upaya Dinas Sosial untuk memberdayakan masyarakatnya, Persamaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah Sama-Sama sub masalah dalam penelitian ini membahas tentang strategi Komunikasi dinas terkait , Perbedaan hasil penelitian dari pembuatan skripsi ini dengan Skripsi Andi Nurhikmawati adalah terletak pada objek yang diteliti. Pada Skripsi Andi, ia meneliti Strategi Komunikasi Dinsos Makassar tentang Program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan UEF (Usaha Ekonomi Produktif) untuk upaya pemberdayaan masyarakat. Sedangkan objek penelitian dari penulis adalah strategi komunikasi Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ponorogo.

*Ketiga Skripsi berjudul “Strategi Komunikasi Dinas Sosial Rejang Lebong Dalam Sosialisasi Program Keluarga Harapan”*Oleh Nando Kaisar Utama Mahasiswa Prodi Komunikasi Penyiaran islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP Tahun 2021⁹menjelaskan bahwaBentuk kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong dalam sosialisasi Program Keluarga Harapan, yaitu dengan metode penyuluhan, pengulangan, rapat koordinasi dan evaluasi. Langkah-langkah strategi

⁹Nando Kaisar Utama,*Strategi Komunikasi Dinas Sosial Rejang Lebong Dalam Sosialisasi Program Keluarga Harapan*,(IAIN Curup:2021)

komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong dalam sosialisasi Program Keluarga Harapan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah Pada tahap terjun lapangan ini peneliti membangnya atas tiga bagian yaitu memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri, memasuki lapangan, dan berperan sambil mengumpulkan data. Dengan demikian peneliti mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental dan juga memperhatikan etika serta menempatkan diri ketika berada di lapangan untuk menggali informasi atau data. Perbedaan hasil penelitian dari pembuatan skripsi ini dengan Skripsi Nando Kaisar Utama adalah terletak pada objek yang diteliti Strategi Komunikasi Dinas Sosial Rejang Lebong Dalam Sosialisasi Program Keluarga Harapan Sedangkan objek penelitian dari penulis adalah strategi komunikasi Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ponorogo.

Keempat Skripsi berjudul “Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dalam Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Gayam” Oleh Anisa Dwi Utami Mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS SAHID SURAKARTA Tahun 2017¹⁰ menjelaskan bahwa Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan masukan untuk Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dalam

¹⁰Anisa Dwi Utami , *Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dalam Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Gayam*, (universitas sahid Surakarta:2017)

mengimplementasikan strategi komunikasi dalam penyuluhan program-program yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Dari penelitian tersebut, titik persamaan penulis dengan penelitian dari Anisa Dwi Utami terletak pada penerapan strategi komunikasi yang bertujuan untuk memberikan pesan atau informasi kepada masyarakat/pelanggan terkait sebuah program. Sedangkan titik perbedaan berupa cara atau media penyampaian informasi terkait program terbarunya ke masyarakat/pelanggan yang berupa talkshow di radio, surat kabar ataupun call center, sedang dalam penelitian penulis strategi yang digunakan berupa penyuluhan langsung.

Kelima Skripsi berjudul “Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kota Cilegon Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Di Cilegon (Studi Kasus Anak Jalanan Di Kawasan Merak)” Oleh Tedi Setiadi Wiranata Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2018¹¹ Menjelaskan Bahwa untuk mengetahui strategi komunikasi, faktor pendukung dan faktor penghambat, penggunaan media dan solusi dalam menanggulangi anak jalanan.

persamaan penulis dengan penelitian ini ialah Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan hasil penelitian dari pembuatan skripsi ini

¹¹Tedi Setiadi Wiranata „Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kota Cilegon Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Di Cilegon (Studi Kasus Anak Jalanan Di Kawasan Merak)(Universitas Sultan Ageng Tirtayasa : 2018)

dengan Skripsi Tedi Setiadi Wiranata adalah terletak pada objek yang diteliti. Pada Skripsi tadi, ia meneliti Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kota Cilegon Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Di Cilegon , Sedangkan objek penelitian dari penulis adalah strategi komunikasi Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ponorogo.

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

a. Jenis pendekatan penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang akan diteliti. Penelitian kualitatif akan fokus pada interpretasi dan pengalaman subjektif dari partisipan dalam penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan detail tentang fenomena yang akan diteliti. disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif¹².

b. Jenis penelitian

Studi kasus adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mempelajari fenomena tertentu di dalam konteks yang spesifik. Penelitian ini akan memfokuskan pada satu organisasi atau institusi, yaitu

¹² Sugiono, S. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* (Bandung: Alfabeta.2013)

Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo, dan menginvestigasi strategi komunikasi yang digunakan oleh institusi tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ponorogo. Dengan menggunakan pendekatan dan jenis penelitian yang tepat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang strategi komunikasi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Melalui Program Keluarga Harapan, serta dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan program-program kesejahteraan masyarakat miskin di masa depan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini Pertama akan dilakukan di Kabupaten Ponorogo dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung kepada masyarakat miskin yang menjadi sasaran program kesejahteraan tersebut. Kedua pihak Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo yang beralamat Jl. Gondo Suli No.35, Sultanagung, Nologaten, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63411 digunakan untuk mengali informasi sesuai keberadaan narasumber.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data kualitatif yang dapat digunakan adalah data hasil wawancara, data hasil observasi, dan data dokumen. Data hasil wawancara merupakan jenis data kualitatif yang diperoleh dari proses

wawancara dengan responden, yaitu masyarakat miskin yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo dan staf Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo. Data ini akan berisi pandangan, pendapat, dan pengalaman responden terkait strategi komunikasi yang digunakan oleh Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo dalam program pemberdayaan masyarakat serta kebutuhan dan harapan masyarakat miskin di Kabupaten Ponorogo.

Data hasil observasi merupakan jenis data kualitatif yang diperoleh dari proses pengamatan langsung terhadap situasi atau kegiatan di lapangan terkait program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo. Data ini akan berisi informasi terkait kegiatan, proses, dan tantangan dalam program pemberdayaan masyarakat serta interaksi dan dinamika antara staf Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo dengan masyarakat miskin di Kabupaten Ponorogo. Data dokumen merupakan jenis data kualitatif yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi terkait kebijakan, program, dan aktivitas Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Data ini akan berisi informasi terkait tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat miskin di Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

1). Sumber Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan¹³, Data primer dalam penelitian "Strategi Komunikasi Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Ponorogo Melalui Program (PKH)" adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat miskin yang telah terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo. Data primer diperoleh melalui Wawancara dengan staf atau pejabat di Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo yang terkait dengan pelaksanaan program PKH , Observasi langsung terhadap kegiatan pelaksanaan program PKH di lapangan , Dokumen dan arsip-arsip terkait dengan pelaksanaan program PKH.

2). Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang lain atau pihak lain, misalnya berupa dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, dan artikel yang masih berkaitan dengan materi penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

a. Observasi (*Observation*)

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses - proses pengamatan dan mengingat. Dalam penelitian ¹⁴metode observasi digunakan agar pokok permasalahan dapat diteliti secara langsung di Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo Dan obsevasi terhadap beberapa orang penerima pkh . Obesrvasi Dilakukan 2 bulan setelah penggarapan skripsi tersebut

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan iide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Mengenai hal ini peneliti akan mewawancarai Pihak - pihak terkait antara lain pihak Bidang Fakmis , Kordinator PKH selaku pengelola Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada di Kantor Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo. Agar wawancara lebih valid, dan beberapa orang penerima pkh. peneliti merekam hasil wawancara untuk dikelola datanya. Sedangkan mekanisme wawancara akan dilakukan dengan cara wawancara terarah yang dilakukan secara individual.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang

¹⁴Dr.Sigit Hermawan S.E, *Metode pemelitan bisnis:pendekatan kuantitatif dan kualitatif*(Mnc publishing:2021)

ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti agar dapat menguatkan argumen peneliti dalam menganalisis permasalahan yang terjadi dan juga sebagai bahan komparasi dari hasil wawancara

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data peneliti melakukan beberapa tahapan untuk mendapatkan sebuah data sehingga nantinya baru bisa diolah, tahapan tersebut diantaranya:

a. Tahap pra lapangan

Pada tahap pra lapangan ini peneliti harus menyusun sebuah rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, membuat instrumen penelitian, dan membuat surat izin untuk melakukan penelitian. Dimana surat izin ini diperlukan karena agar saat melakukan penelitian, peneliti bisa mendapatkan informasi dan sumberdata yang diperlukan dengan tenang dan detail tanpa ada pra duga yang tidak baik dari pihak lembaga atau organisasi yang ingin diteliti, serta menyiapkan hal-hal lain yang dibutuhkan didalam kegiatan penelitian.

b. Tahap Turlap/Terjun Lapangan

Pada tahap terjun lapangan ini peneliti membangnya atas tiga bagian yaitu memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri, memasuki lapangan, dan berperan sambil mengumpulkan data. Dengan demikian peneliti mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental dan juga memperhatikan etika serta menempatkan diri ketika berada dilapangan untuk menggali informasi atau data.

c. Tahap analisis data

Pada tahap analisis data ini meliputi analisis data baik yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek dari sumber data yang telah diperoleh.

d. Tahap penulisan laporan

Pada tahap penulisan laporan ini peneliti menyusun data dan kemudian menyesuaikan data yang telah diperoleh dalam bentuk skripsi

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data yang sudah dengan caraisistematis baik itu yang berasal dari sumber wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain¹⁵. Teknik analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendapat Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi¹⁶

¹⁵ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA), 2013

¹⁶ Ali Nurdin, *Komunikasi magis, fenomena dukun di pedesaan*, (Lkis pelangi aksara :2015)15

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakkan dan transformasi data. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok penting sehingga mudah dikendalikan

b. Penyajian Data

Penyajian data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian diperoleh dari lapangan terkait seluruh permasalahan penelitian dipilih antara yang dibutuhkan dan yang tidak diperlukan, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dari sebuah penelitian adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setiap hipotesis atau kesimpulan sementara akan berubah ketika ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Setelah mengumpulkan banyak data peneliti mulai mencari arti-arti yang jelas. Berbagai kesimpulan akan diverifikasi selama penelitian berlangsung salah satunya dengan meninjau kembali hasil temuan data di lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara, penarikan kesimpulan sementara masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan dengan cara mereflesi kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, triangulasi sehingga kebenaran dari data dapat tercapai. Tetapi jika kesimpulan didukung oleh bukti-

bukti yang valid maka kesimpulan dapat dikatakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesisi atau teori. Dalam hal ini peneliti mengolah data dan mengorganisasikan hasil temuan data serta informasi dari pengamatan, wawancara serta dokumentasi terkait dengan Strategi Komunikasi Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Melalui Program PKH Di Kabupaten Ponorogo

7. Uji Keabsahan Data

Dalam bukunya Sugiono menjelaskan ada empat bentuk dalam uji keabsahan data yaitu uji kredibilitas data, uji dependibilitas data, uji transfibilitas, dan uji komfirmabilitas. Namun dari empat bentuk itu uji kredibilitas data lah yang utama untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan tujuh teknik yaitu diantaranya, perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat. Dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data.¹⁷ Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

¹⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, 2009

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat maka diperlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian.

b. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan yang dimaksud idalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang dicari. Jadi disini kita harus perpanjang keikutsertaan menyediakan lingkup maka ketekunan pengamatan sangat diperlukan.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori Untuk mendapatkan data dan kredibel dalam penelitian diperlukan teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dalam tekniik pengumpulan data triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber data yang ada. Ada tiga macam triangulasi diantaranya yaitu sebagai tersebut:

1) Triangulasi sumber

Cara meningkatkan kepercayaan penelitian adalah dengan mencari data dari sumber data yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Peneliti perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber.

2) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3) Triangulasi waktu

Peneliti dapat mengecek konsistensi, kedalaman dan peneliti dapat mengecek suatu data dengan menggunakan triangulasi waktu yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber misalnya untuk menggali sumber informasi atau data. Terkait Strategi komunikasi dalam mengatasi masalah kemiskinan, peneliti disini menggunakan narasumber yang berbeda-beda dari mulai kepala dinas sosial p3a kabupaten ponorogo, bidang fakir miskin serta salah satu masyarakat yang mendapatkan bantuan

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian dalam memahami skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian yang terdiri dari lima bab dengan uraian berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan, didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustakan dan metode yang digunakan dalam penelitian

BAB II Merupakan landasan teori tentang teori strategi komunikasi yang meliputi pengertian, serta menyusun strategi komunikasi dan memperhatikan keterpautan komponen-komponennya juga perlu mempertimbangkan adanya faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Selain itu juga juga membahas mengenai kesejahteraan sosial, teori keluarga dan terakhir membahas mengenai kemiskinan.

BAB III Merupakan gambaran umum dan mendeskripsikan mengenai kondisi objektif , Profil , sejarah, visi dan misi dari Dinas sosial, P3a kabupaten ponorogo

BAB IV Merupakan analisis dan pembahasan yang terdapat dalam rumusan masalah yaitu berisi tentang Strategi komunikasi dinas sosial,p3a kabupaten ponorogo dalam mengatasi

masalah kemiskinan di kabupaten ponorogo

BAB V Berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berupa pernyataan singkat yang merupakan jawaban atas masalah yang telah dibahas pada masing-masing bab yang sudah di bahas



BAB II

STRATEGI KOMUNIKASI, KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN KEMISKINAN

A. Strategi Komunikasi

1. Pengertian Strategi Komunikasi

Strategi adalah fondasi tujuan organisasi dan pola gerak sertapendekatan manajemen mencapai tujuan. Strategi adalah rencana menyatu, komprehensif dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategis badan usaha dengan kesempatan serta ancaman yang datang dari luar. Menyatakan adalah memadukan bagian-bagian, jadi tidak parsial, holistik sifatnya dan berupa kegiatan sistem keseluruhan. Komprehensif berarti melingkupi segala aspek dan keterpaduan berarti bagian-bagian dijadikan serasi.¹⁸ Sehingga, dapat dipahami bahwa strategi adalah sekumpulan rencana secara menyeluruh yang diatur sedemikian rupa kemudian menjadi dasar atau sebagai acuan untuk mencapai tujuan organisasi.

Definisi lain menyebutkan bahwa strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Jadi, strategi komunikasi merupakan paduan perencanaan komunikasi

¹⁸ Sukanto Reksohadiprodjo, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003), 41-42.

dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁹ Sementara itu, strategi komunikasi menurut Rogers adalah “suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru.”²⁰ Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa strategi komunikasi adalah sebuah rancangan atau perencanaan yang dibuat dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku manusia melalui proses penyampaian pesan atau ide-ide.

Middleton juga menyatakan “strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.”²¹ Berdasarkan pernyataan tersebut penulis memahami bahwa strategi komunikasi adalah sebuah perencanaan melalui proses komunikasi, yakni melibatkan keseluruhan unsur komunikasi untuk mencapai suatu tujuan komunikasi yang efektif atau optimal. Sehingga, berdasarkan beberapa definisi di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa strategi komunikasi adalah sebuah perencanaan dan manajemen komunikasi yang dilaksanakan melalui proses komunikasi untuk menyampaikan sebuah ide atau informasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi mencakup semua unsur komunikasi yang berperan aktif dalam proses komunikasi.

¹⁹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*, 32.

²⁰ Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, 61

²¹ *Ibid.*, 61.

Roger memberi batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru²². Seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton membuat definisi dengan menyatakan “Strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal²³

Penelaahan mengenai berlangsungnya sebuah komunikasi tidak bisa lepas dari pengkajian terhadap pertautan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya dalam proses komunikasi. Arifin Anwar menyatakan bahwa elemen yang harus diperhatikan didalam merumuskan strategi komunikasi adalah pengenalan khalayak, pesan, metode, media, dan komunikator. Dengan begitu untuk mantapnya perumusan strategi komunikasi, maka segala sesuatunya harus dipertautkan dengan komponen-komponen yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan dalam rumusan Harold Laswell "*Who Says What Which What Channel To Whom With What Effect?*", maksudnya yaitu: *Who?*

²²Rogers, E, *Communication strategies for family planning*. (The Journal of Communication: 1976)176-187.

²³Middleton, N, *The strategic planning of public relations* (London: International Thomson Business Press.1990)

(Siapakah komunikatornya), *Says what?* (pesan apa yang dinyatakannya), *In which channel?* (media apa yang digunakannya), *To Whom?* (siapa komunikannya), dan *With what effect?* (efek apa yang diharapkan).

Komunikasi merupakan proses yang rumit. Maka dari itu saat menyusun strategi komunikasi selain memperhatikan keterpautan komponen-komponenya juga perlu mempertimbangkan adanya faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.

Maka Dari itu Dalam merumuskan strategi komunikasi, Anwar Arifin berpendapat bahwa ada lima faktor yang harus diperhatikan yaitu:

a. Pengenalan Khalayak

Mengenal khalayak merupakan langkah pertama bagi komunikator dalam usaha menciptakan komunikasi yang efektif. Mengingat dalam proses komunikasi, khalayak itu sama sekali tidak pasif, melainkan aktif. Sehingga antara komunikator dengan komunikan bukan saja terjadi saling hubungan, tetapi juga saling mempengaruhi. Sebelum melancarkan komunikasi perlu mempelajari siapa yang akan menjadi sasaran komunikasi. Semua itu tergantung pada tujuan komunikasi, apakah komunikan hanya sekedar mengetahui (dengan metode informatif), atau agar komunikan melakukan tindakan tertentu (dengan metode persuasif atau instruktif). Apapun tujuannya, metode dan banyaknya sasaran pada diri komunikan perlu diperhatikan faktor kerangka referensi dan faktor situasi dan kondisi. Pesan komunikasi

yang disampaikan harus disesuaikan dengan kerangka referensinya. Kerangka referensi seseorang terbentuk dalam dirinya sebagai hasil dari panduan pengalaman, pendidikan, gaya hidup, norma hidup, status sosial, ideologi, cita-cita, dan sebagainya. Berkaitan dengan kerangka referensi, akan lebih sulit apabila mengenal kerangka referensi komunikasi dalam komunikasi massa yang sifatnya heterogen, oleh karena itu pesan yang disampaikan kepada khalayak sasaran.

melalui media massa hanya yang bersifat informatif dan umum yang dapat dimengerti oleh semua orang, jika pesan yang disampaikan kepada khalayak bersifat persuasif, maka akan lebih efektif apabila khalayak dibagi dalam kelompok-kelompok khusus lalu diadakan komunikasi kelompok dengan mereka. Pada faktor situasi dan kondisi, yang dimaksud dengan situasi adalah situasi komunikasi pada saat komunikasi akan menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Situasi yang menghambat jalannya komunikasi dapat diduga sebelumnya, atau dapat datang secara tiba-tiba pada saat komunikasi dilancarkan. Dan yang dimaksud dengan kondisi adalah keadaan psikis dan fisik komunikasi pada saat ia menerima pesan.²⁴

b. Penyusunan Pesan

Menyusun pesan berarti menentukan tema dan materi. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut ialah mampu

²⁴ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 35-37.

membangkitkan perhatian. Perhatian adalah pengamatan terpusat, karena itu tidak semua yang diamati dapat menimbulkan perhatian. Dengan demikian awal dari suatu efektifitas dalam komunikasi, ialah bangkitnya perhatian dari khalayak terhadap pesan-pesan yang disampaikan. Berkaitan dengan pesan, kriteria yang dapat mendukung suksesnya sebuah pesan dalam komunikasi adalah:

- 1) Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi sasaran yang dimaksud.
- 2) Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju pada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga sama-sama dapat dimengerti.
- 3) Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut.
- 4) Pesan harus menyarankan suatu cara untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok tempat komunikan berada pada saat ia digerakkan untuk memberi tanggapan yang dikehendaki.²⁵

c. Menetapkan Metode

Metode untuk mencapai efektifitas dari suatu komunikasi, selain dari kemantapan isi pesan yang diselaraskan dengan kondisi khalayak dan sebagainya, maka metode komunikasi akan turut mempengaruhi

²⁵ Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*, (Bandung: PT Amrico, 1989), 59.

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Dalam dunia komunikasi, metode penyampaian itu dapat dilihat dari dua aspek yaitu: menurut cara pelaksanaannya dan menurut bentuk isinya. Menurut cara pelaksanaannya, dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu, metode *redundancy* dan *canalizing*.

1) Metode *redundancy*, adalah cara mempengaruhi khalayak dengan jalan mengulang-ulang pesan pada khalayak. Dengan penggunaan metode ini, banyak manfaat yang dapat diambil darinya. Manfaat itu antara lain bahwa khalayak akan lebih memperhatikan pesan yang disampaikan komunikator. Hal ini karena justru kontras dengan pesan yang tidak diulang-ulang, sehingga ia akan mengikat perhatian. Meskipun dalam melakukan metode *redundancy* dalam berkomunikasi memiliki manfaat agar pesan yang disampaikan komunikator diperhatikan komunikan, namun sebaiknya, komunikator tetap mempertimbangkan variasi-variasi yang menarik dan tidak membosankan dalam pengulangan pesannya.

2) Metode *canalizing*, mempengaruhi khalayak untuk menerima pesan yang disampaikan, kemudian secara perlahan-lahan merubah sikap dan pola pemikirannya ke arah yang kita kehendaki. Proses *canalizing* ini juga adalah memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau khalayak, tentunya bisa kita lakukan dengan memenuhi nilai-nilai standar kelompok atau masyarakat. Namun bila hal ini kemudian tidak memungkinkan bagi

komunikator, maka cara memecah perlahan komunikan dengan anggota kelompoknya sehingga mereka tidak memiliki hubungan yang erat, dan kemudian komunikator menarik komunikan tersebut dalam pengaruhnya menjadi bagian dalam strategi komunikasi *canalizing* ini. Selain itu, metode *canalizing* kita bisa menggunakan teori K.Berlo tentang *inference theory of empathy*, atau penurunan dari penempatan diri ke dalam tempat orang lain. Artinya komunikator mengandaikan diri (pribadi hayal) bagaimana ketika dia berada diposisi komunikan. Adanya pribadi hayal ini, komunikator kemudian dapat menemukan dan mengidentifikasi persamaan-persamaan dan perbedaan dengan khalayak, sehingga dengan mudah melakukan penyesuaian diri dengan khayalak tersebut.

Sedangkan yang kedua menurut bentuk isinya dikenal metode-metode: informatif, persuasif, edukatif, koersif

- a) Metode informatif, lebih ditujukan pada penggunaan akal pikiran khalayak, dan dilakukan dalam bentuk pernyataan berupa: keterangan, penerangan, berita, dan sebagainya. Perlu diketahui, bahwa memberi bentuk tertentu terhadap isi suatu pesan pada khalayak tertentu, dengan sendirinya akan menghasilkan efek tertentu pula. Dalam dunia publistik atau komunikasi massa dikenal salah satu bentuk pesan yang bersifat informatif, yaitu suatu bentuk isi pesan yang bertujuan untuk

mempengaruhi khalayak dengan jalan memberi penerangan. Penerangan berarti menyampaikan sesuatu apa adanya, apa sesungguhnya, di atas fakta-fakta dan data-data yang benar serta pendapat yang benar pula.

- b) Metode persuasif, yaitu mempengaruhi khalayak dengan jalan membujuk. Dalam hal ini khalayak digugah baik pikiran maupun perasaannya. Dengan demikian metode persuasif merupakan suatu cara untuk mempengaruhi komunikasi, dengan tidak terlalu banyak berfikir kritis, bahkan kalau dapat khalayak itu dapat dipengaruhi secara tidak sadar dengan cara komunikator terlebih dahulu menciptakan situasi yang mudah kena sugesti.
- c) Metode edukatif, memberikan sesuatu ide kepada khalayak berdasarkan fakta-fakta, pendapat dan pengalaman yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi kebenarannya dengan disengaja, teratur dan berencana, dengan tujuan mengubah tingkah laku manusia ke arah yang diinginkan. Oleh karena itu, suatu pernyataan kepada umum dengan memakai metode edukatif ini akan memberikan pengaruh yang mendalam kepada khalayak, kendatipun hal ini akan memakan waktu yang sedikit lebih lama dibanding dengan memakai metode persuasif.

d) Metode koersif, mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa tanpa memberi kesempatan berpikir untuk menerima gagasanggagasan yang dilontarkan, dimanifestasikan dalam bentuk peraturan-peraturan, intimidasi dan biasanya di belakangnya berdiri kekuatan tangguh. Menyusun suatu pernyataan umum yang bersifat kursif ini tidaklah sefleksibel pernyataan umum yang lainnya, dan apabila memang ada kekuatan yang mendukungnya, tentu efeknya akan lebih besar²⁶

d. Penetapan Media

Dalam menciptakan komunikasi yang efektif, pemilihan media memiliki peran penting. Menurut Jalaluddin Rahmat yang mengutip pandangan Elizabeth Noell Neuman bahwa ada empat ciri pokok dalam berkomunikasi melalui media. Terutama bagi media massa.

- 1) Bersifat tidak langsung, artinya bahwa harus melewati media teknis.
- 2) Bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara satu peserta komunikasi.
- 3) Bersifat terbuka, artinya ditujukan pada publik yang terbatas dan anonim.
- 4) Mempunya publik yang secara geografis tersebar.²⁷

²⁶ Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*, 73-77.

²⁷ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 189.

e. Peranan Komunikator

Komunikator adalah pelaku utama dalam komunikasi karena komunikator menjadi sumber dan kendali semua aktivitas komunikasi. Jika suatu proses komunikasi tidak berhasil dengan baik, maka kesalahan utama bersumber dari komunikator. Karena komunikator lah yang tidak memahami penyusunan pesan, media yang tepat dan mendekati khalayak yang menjadi target sasaran. Untuk itu, seorang komunikator yang akan bertindak sebagai ujung tombak suatu program harus terampil berkomunikasi, kaya ide serta penuh daya kreativitas. Menurut Cangara, ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang

Komunikator: “pertama, tingkat kepercayaan orang lain terhadap dirinya, kedua, daya tarik (*attractive*), ketiga, kekuatan (*power*).” Syarat pertama yang harus dimiliki oleh seorang komunikator adalah kredibilitas. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki seorang komunikator sehingga bisa diterima oleh target sasaran. Kredibilitas tersebut antara lain menunjukkan karakter kepribadian seseorang sehingga ucapan-ucapannya dapat dipercaya, memiliki kekuatan dalam mengendalikan emosi pendengarnya, dan memiliki kekuatan melalui argumentasinya.

Syarat kedua yang harus dimiliki oleh seorang komunikator adalah daya tarik (*attractive*). Daya tarik pada umumnya disebabkan karena cara bicara yang sopan, murah senyum, cara berpakaian yang apik dan

necis, dan postur tubuh yang gagah. Simpati tumbuh karena daya tarik yang ditampilkan oleh seseorang. Syarat ketiga yang harus dimiliki oleh seorang komunikator adalah kekuatan (*power*)

B. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah suatu konsep yang mencakup upaya dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada dalam situasi rentan atau terpinggirkan. Menurut Kementerian Sosial (Kemensos) Indonesia, kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai upaya pemerintah dan masyarakat untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar individu dan kelompok dalam rangka mencapai kehidupan yang layak.²⁸

Berikut adalah beberapa poin yang mencakup pengertian kesejahteraan sosial menurut Kemensos²⁹:

1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar: Kesejahteraan sosial berupaya untuk memastikan bahwa setiap individu dan kelompok masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.
2. Perlindungan Sosial: Kesejahteraan sosial melibatkan upaya untuk melindungi individu dan kelompok masyarakat dari risiko sosial, seperti

²⁸ www.kemensos.go.id

²⁹ Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Mensos Paparkan Visi Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Diakses melalui <https://kemensos.go.id/mensos-paparkan-visi-pembangunan-kesejahteraan-sosial>.

kemiskinan, pengangguran, kekerasan, diskriminasi, dan penyalahgunaan.

3. Pemberdayaan Masyarakat: Kesejahteraan sosial juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat, dengan memberikan akses dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Ini mencakup pengembangan keterampilan, peningkatan pendidikan, akses ke pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
4. Pelayanan Sosial: Kesejahteraan sosial melibatkan penyediaan berbagai pelayanan sosial seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, perawatan anak dan orang dewasa yang terlantar, serta perlindungan bagi anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
5. Jaminan Sosial: Kesejahteraan sosial juga mencakup sistem jaminan sosial, yang melibatkan pengaturan dan penyediaan perlindungan bagi masyarakat dalam situasi yang membutuhkan, seperti jaminan kesehatan, jaminan pensiun, asuransi sosial, dan perlindungan sosial lainnya.

Pengertian kesejahteraan sosial menurut Kemensos mencakup aspek-aspek tersebut dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, berkeadilan, dan sejahtera.

1. Tujuan Kesejahteraan sosial

Menurut Kemensos (Kementerian Sosial) Indonesia, tujuan dari kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Hidup: Kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.
- b. Mengurangi Ketimpangan Sosial: Salah satu tujuan kesejahteraan sosial adalah mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat. Ini dilakukan dengan memberikan akses yang adil dan merata terhadap sumber daya dan peluang, serta melindungi kelompok rentan dari kemiskinan, diskriminasi, dan marginalisasi.
- c. Melindungi Kelompok Rentan: Kesejahteraan sosial bertujuan untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan, korban kekerasan, dan orang miskin. Hal ini dilakukan melalui program-program bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi.
- d. Mendorong Pemberdayaan Masyarakat: Tujuan kesejahteraan sosial juga mencakup pemberdayaan masyarakat, yaitu memberikan kesempatan kepada individu dan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, akses ke pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

- e. **Membangun Sistem Perlindungan Sosial yang Kuat:** Kesejahteraan sosial juga bertujuan untuk membangun sistem perlindungan sosial yang kuat, yang melibatkan jaring pengaman sosial seperti jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, asuransi sosial, dan perlindungan sosial lainnya. Tujuannya adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam situasi yang membutuhkan.
- f. **Mewujudkan Keadilan Sosial:** Kesejahteraan sosial bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Ini berarti memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk meraih kehidupan yang lebih baik, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, dan kondisi sosial-ekonomi.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, Kemensos berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, berkeadilan, dan sejahtera, di mana setiap individu memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

2. Fungsi Kesejahteraan sosial

Menurut Kementerian Sosial (Kemensos) Indonesia, fungsi kesejahteraan sosial melibatkan sejumlah peran dan tujuan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa fungsi kesejahteraan sosial menurut Kemensos:

- a. **Perlindungan Sosial:** Kesejahteraan sosial berfungsi sebagai perlindungan bagi individu dan kelompok yang berada dalam situasi rentan atau

terpinggirkan, seperti anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, tunawisma, dan korban kekerasan. Fungsi ini mencakup penyediaan bantuan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan hukum, dan jaminan keamanan sosial.

- b. Penyediaan Pelayanan Sosial: Kesejahteraan sosial berfungsi untuk menyediakan berbagai pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan, perawatan anak dan orang dewasa yang terlantar, pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, dan pengembangan masyarakat.
- c. Pemberdayaan Masyarakat: Kesejahteraan sosial berperan dalam memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Fungsi ini mencakup pemberian akses ke sumber daya, pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
- d. Penyusunan Kebijakan Sosial: Kesejahteraan sosial memiliki peran dalam menyusun kebijakan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Fungsi ini melibatkan analisis masalah sosial, pengembangan program-program sosial, koordinasi dengan stakeholder terkait, dan pemantauan implementasi kebijakan sosial.

- e. Pengembangan Sistem Jaminan Sosial: Kesejahteraan sosial berfungsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem jaminan sosial yang mencakup jaminan kesehatan, jaminan pensiun, asuransi sosial, dan perlindungan sosial lainnya. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk memastikan keberlangsungan dan perlindungan sosial bagi masyarakat dalam situasi yang membutuhkan.

C. Kemiskinan

Menurut Kementerian Sosial (Kemensos) Indonesia, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan³⁰.

Berikut adalah beberapa macam kemiskinan yang dikenal menurut Kemensos:

1. Kemiskinan Absolut: Kemiskinan absolut terjadi ketika individu atau keluarga tidak memiliki akses yang cukup terhadap kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, pakaian, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan absolut biasanya diukur dengan menggunakan Garis Kemiskinan sebagai acuan untuk menentukan batas pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut

³⁰ Kementerian Sosial Republik Indonesia). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*.(Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.)

2. Kemiskinan Struktural: Kemiskinan struktural berkaitan dengan ketidakadilan dan kesenjangan struktural dalam masyarakat, yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Kemiskinan struktural disebabkan oleh faktor-faktor seperti akses terbatas terhadap sumber daya, kesenjangan pendapatan, kurangnya peluang kerja yang layak, rendahnya kualitas pendidikan, serta permasalahan struktural lainnya.
3. Kemiskinan Siklis: Kemiskinan siklis merujuk pada kondisi kemiskinan yang berlanjut dari generasi ke generasi dalam satu keluarga. Kemiskinan siklis bisa terjadi karena rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya akses terhadap pekerjaan yang layak, serta ketidakstabilan ekonomi yang menghambat keluar dari lingkaran kemiskinan.
4. Kemiskinan Geografis: Kemiskinan geografis terjadi di wilayah-wilayah tertentu yang menghadapi tantangan dan keterbatasan khusus dalam akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Wilayah pedesaan yang terpencil, wilayah perbatasan, dan wilayah dengan infrastruktur yang terbatas sering mengalami kemiskinan geografis.

Penting untuk dicatat bahwa ini hanya beberapa contoh kemiskinan yang dikenal oleh Kemensos. Terdapat kompleksitas yang lebih dalam dalam memahami dan mengatasi kemiskinan, dan faktor-faktor seperti gender, disabilitas, dan etnisitas juga dapat mempengaruhi kondisi kemiskinan seseorang atau kelompok masyarakat.

BAB III

PAPARAN DATA STRATEGI KOMUNIKASI DINAS SOSIAL,P3A KABUPATEN PONOROGO DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

A. Deskripsi Data Umum

1. PROFIL DINAS SOSIAL,P3A KABUPATEN PONOROGO

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan tempat menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Ponorogo. (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2011 tentang pelaksanaan dan penata usahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari pendapatan dan belanja daerah)³¹

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana urusan pemerintah yang telah menjadi kewenangan kabupaten dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Mempunyai tugas tugas dalam membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

³¹ dinsos.ponorogo.go.id

kabupaten; dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 152 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo).

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo terletak di Jl Gondosili No. 35 Nologaten, Kecamatan Ponorogo. Salah satu lembaga pemerintahan yang menaungi permasalahan sosial, perempuan dan anak ini memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sebagai berikut:

2. Visi Dan Misi Dinas Sosial,P3A Kabupaten Ponorogo

VISI Dinas Sosial,P3A Kabupaten Ponorogo Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Tegas, Amanah dan Taqwa)

Misi Dinas Sosial,P3A Kabupaten Ponorogo adalah :

- a. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata.
- b. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya.

- c. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
- d. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas dan Responsif.³²

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 352 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo Kabupaten Ngawi, maka jabatan struktural pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi sebagai berikut :

- a.. Kepala Dinas Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum
- b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - 3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

³² *dinsos.ponorogo, profildinsosp3akabupatenponorogo*

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

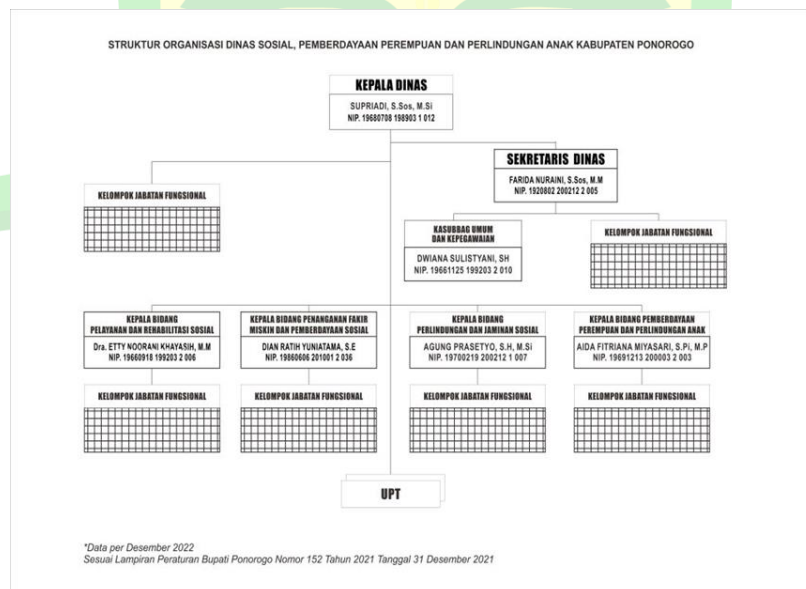
- 1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
- 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 3) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- 1). Seksi Pemberdayaan Perempuan
- 2). Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
- 3). Seksi Perlindungan Perempuan Dan Anak

f. Kelompok Pejabat Fungsional

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Sosial,P3A Kabupaten Ponorogo



33

P O N O R O G O

4. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo mempunyai:

Tugas :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

B. DESKRIPSI DATA UMUM OBJEK PENELITIAN

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.³⁴

Melalui PKH, KM didorong untuk mempunyai akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Misi besar PKH sendiri adalah untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% yang kemudian pada tahun 2019 Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8%. PKH juga diharapkan mampu berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan

³⁴<https://www.kemensos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1537>
Diakses pada 9 Mei 2023

jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Rancangan Umum Pelaksanaan PKH

a. Pelaksana

PKH sebagai program prioritas nasional dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI dan bekerjasama dengan mitra kerja, antara lain³⁵

- 1) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI berperan mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh program penanggulangan kemiskinan.
- 2) Kementerian PPN/Bappenas, berperan dalam perencanaan serta monitoring dan evaluasi program.
- 3) Kementerian Keuangan RI, sebagai bendahara urusan Negara memberikan dukungan anggaran dan regulasi penyaluran bantuan sosial.
- 4) Kementerian Kesehatan RI, berperan sebagai penyedia layanan kesehatan dan membantu pelaksanaan verifikasi kesehatan.
- 5) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Agama RI, berperan sebagai penyedia layanan pendidikan dan membantu pelaksanaan verifikasi pendidikan

³⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia. Rancangan Umum Pelaksanaan PKH, (2020).

- 6) Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, berperan dalam pelaksanaan sosialisasi PKH secara Nasional.
- 7) Kementerian Dalam Negeri RI, berperan dalam memfasilitasi penerbitan data kependudukan KPM PKH.
- 8) Badan Pusat Statistik (BPS), berperan dalam pelaksanaan pendataan kemiskinan untuk Basis Data Terpadu.
- 9) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berperan dalam dukungan PKH secara langsung melalui alokasi dana dampingan Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBD).

b. Tujuan

Program Keluarga Harapan Bertujuan:

- 1) Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan

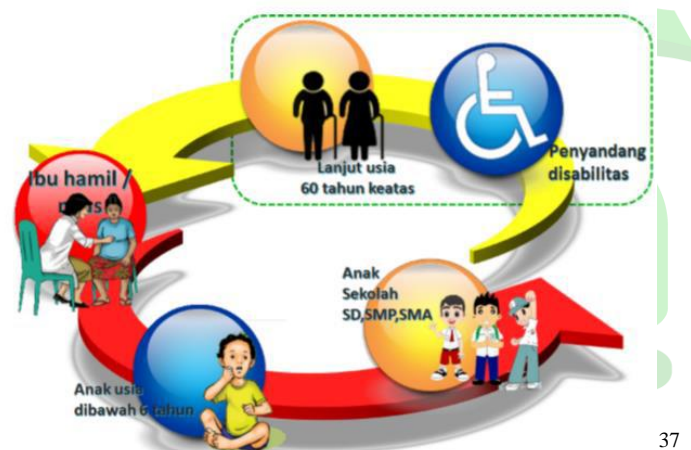
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat³⁶

c. Kriteria Komponen

Kriteria komponen PKH terdiri atas:

- 1) Kriteria komponen kesehatan meliputi: ibu hamil, dan anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 tahun
- 2) Kriteria komponen pendidikan meliputi: anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
- 3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi: lanjut usia mulai dari 60 taun dan penyandang disabilitas berat

Gambar 2. Komponen PKH



37

³⁶ Kementerian Sosial Republik Indonesia, Tujuan Program Keluarga Harapan, (2020)

d. Hak dan Kewajiban KPM PKH

1) Hak KPM PKH

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a) Menerima bantuan sosial
- b) Pendampingan sosial
- c) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial
- d) Program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya

2). Kewajiban KPM PKH

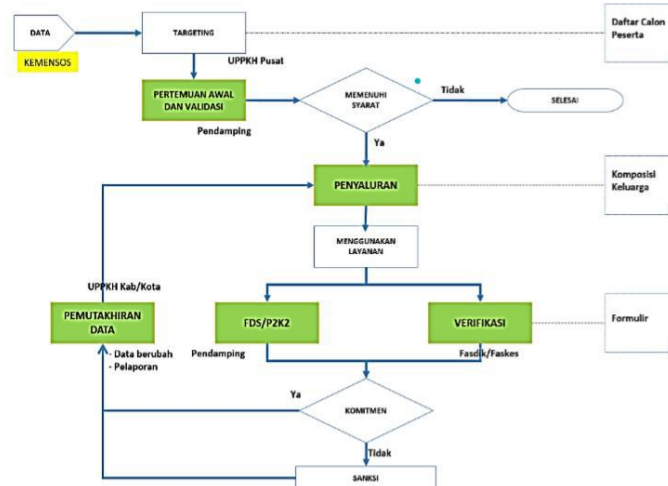
Kewajiban peserta PKH terdiri atas empat hal sebagai berikut:

- a). Anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibuhamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 tahun.

³⁷Buku *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019* Kementerian Sosial RI

- b) Anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun
- c) Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lansia dari umur 60 tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
- d) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.
- e. Mekanisme Pelaksanaan PKH

Gambar 3. Alur Pelaksanaan PKH



38

- 1) **Perencanaan.** Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat. Lokasi dan jumlah calon

KPM bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin.

- 2) **Penetapan Calon Peserta PKH.** Penetapan calon peserta PKH dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH. Penetapan calon peserta PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.
- 3) **Persiapan Daerah.** Daerah lokasi perluasan PKH, mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a). Dinas/Instansi Sosial provinsi/kabupaten/kota membentuk Pelaksana Program Keluarga Harapan tingkat provinsi/kabupaten/kota/kecamatan
 - b). Pembentukan tim koordinasi teknis PKH di provinsi/kabupaten/kota dengan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);
 - c). Dinas/Instansi Sosial provinsi/kabupaten/kota menyediakan infrastruktur terkait untuk mendukung pelaksanaan PKH kabupaten/kota;

d). Kantor Kecamatan menyediakan infrastruktur terkait untuk mendukung pelaksanaan PKH di kecamatan;

e). Melakukan sosialisasi PKH kepada Tim koordinasi kabupaten/kota dan Aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan

4) Mengadakan Pertemuan Awal dan Validasi agar calon KPM PKH

memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH, pendamping sosial PKH melakukan sosialisasi PKH pada pertemuan awal. Kegiatan pertemuan awal dapat di gunakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH (*eligible*).

5) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH . KPM PKH yang

ditetapkan adalah keluarga yang memenuhi komponen dan kriteria PKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan: (1). hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan telah dibukakan rekening bank; dan/atau (2). hasil verifikasi komitmen dan/atau pemutakhiran data. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH dilakukan melalui keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

6) Penyaluran Bantuan.Bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagaiberikut:

- a) Nilai bantuan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
- b) Bantuan sosial PKH terdiri dari Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen.
- c) Bantuan tetap adalah bantuan stimulan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- d) Bantuan komponen adalah bantuan yang diberikan berdasarkan komponen yang ada dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yaitu komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan / atau komponen kesejahteraan sosial.
- e) Jumlah bantuan maksimal 4 orang dalam satu keluarga.
- f) Nilai bantuan bagi kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- g) Transfer dana dari Kas Negara ke lembaga bayar dilakukan setiap tahap penyaluran bantuan dengan mekanisme Non Tunai.

7) Pendampingan. Pendampingan bagi KPM PKH diperlukan guna percepatan pencapaian tujuan program. Pendamping sosial PKH menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas

kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pendamping sosial PKH juga memastikan KPM PKH memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan persyaratan untuk perubahan perilaku KPM PKH.

8) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). P2K2 atau yang dikenal dengan Family Development Session (FDS) merupakan sebuah intervensi perubahan perilaku yang terstruktur. P2K2 diberikan pada semua KPM PKH sejak tahun pertama kepesertaan PKH. Materi P2K2 wajib disampaikan melalui pertemuan kelompok setiap bulan yang disampaikan oleh Pendamping Sosial PKH terhadap kelompok-kelompok dampungannya.

9) Verifikasi komitmen

10) Pemutakhiran Data. Maksud dan Tujuan Pemutakhiran data adalah untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial. Khusus PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan.

3. Kelembagaan PKH Di Tingkat Kabupaten

a. Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota

1) Susunan Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota terdiri atas:

Ketua : Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota

Sekretaris : Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

- 2) Tim Koordinasi Teknis PKH kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota
- 3) Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota bertugas:
 - a) menyusun program dan rencana kegiatan PKH Kabupaten/Kota;
 - b) komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
 - c) penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan;
 - d) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di kabupaten/kota;
 - e) melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH;
 - f) menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH dilapangan
 - g) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada kepala daerah, kepada pelaksana PKH provinsi dan pelaksana PKH Pusat.

b. Pelaksana PKH Kabupaten/Kota

Pelaksana PKH Kabupaten/Kota adalah Dinas/Instansi Sosial terdiri atas:

- 1) Ketua : Kepala Bidang Urusan Bantuan dan Jaminan Sosial
- 2) Sekretaris : Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial

c. Pelaksana PKH Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH dikecamatan;

- 2) melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di kecamatan;
- 3) memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
- 4) menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
- 5) membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH

C. DESKRIPSI DATA KHUSUS

1. Bentuk strategi komunikasi Dinsos, P3A Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program sosial yang dicanangkan oleh pemerintah. Namun, keberhasilan program ini tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang menjadi sasaran dari program ini. Oleh karena itu, penting bagi Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Ponorogo untuk memperhatikan bentuk strategi komunikasi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam Program PKH. Dalam konteks ini, penelitian menjadi hal yang penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi bentuk strategi komunikasi yang tepat dan efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam Program PKH.

Menurut Ibu Dian Ratih Yuniatama, S.E Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dan Pemberdayaan Sosial

“Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos,P3A) Kabupaten Ponorogo dapat merancang strategi komunikasi yang efektif. Strategi komunikasi yang efektif sangat penting untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PKH ”³⁹

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos,P3A) Kabupaten Ponorogo berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk mencapai tujuan ini, Dinsos,P3A Kabupaten Ponorogo perlu merancang strategi komunikasi yang efektif agar program PKH dapat lebih banyak diikuti oleh masyarakat dan mencapai jangkauan yang lebih luas. pentingnya strategi komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dian Ratih Yuniatama, S.E Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dan Pemberdayaan Sosial sebagai berikut:

“ Salah satu bentuk strategi yang dapat diterapkan adalah sosialisasi PKH melalui media massa. Dengan memanfaatkan media massa, Dinsos,P3A Kabupaten Ponorogo dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan meningkatkan pemahaman mereka mengenai manfaat dan prosedur PKH. Sosialisasi dapat dilakukan melalui iklan, talkshow, atau publikasi artikel yang dapat menarik perhatian masyarakat. Selain itu, Dinsos,P3A Kabupaten Ponorogo dapat memberikan pelatihan kepada para relawan, petugas

³⁹ Wawancara dengan Dian Ratih Yuniatama, S.E Kordinator PKHI, dilakukan pada Kamis 13 April 2023

lapangan, dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program PKH mengenai keterampilan komunikasi dan pemberdayaan⁴⁰.

Meskipun Strategi komunikasi yang digunakan sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PKH. Namun, strategi ini tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan secara keseluruhan. Perlu juga dipertimbangkan akses masyarakat terhadap media sosial dan media massa. Pelatihan keterampilan komunikasi dan pemberdayaan harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat dan terintegrasi dengan program-program lainnya.

Peneliti juga mendapat keterangan yang sama dari informan lain, yakni seperti yang dikatakan oleh Ahmad Daroini selaku Operator PKH Dinas Sosial Ponorogo berikut ini:

“ Melalui PKH, kami telah memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu, seperti anak usia sekolah, ibu hamil dan menyusui, serta lanjut usia. Bantuan ini berupa tunai maupun non-tunai, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan gizi. Dampak dari program ini sangat signifikan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Kabupaten Ponorogo. Bantuan PKH mampu memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak keluarga miskin, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, bantuan kesehatan dan gizi juga membantu meningkatkan kesehatan dan nutrisi keluarga miskin. Untuk memastikan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ponorogo, kami menggunakan berbagai bentuk strategi komunikasi yang efektif.”⁴¹

Menurut Kordinator PKH, Program Keluarga Harapan berhasil memberikan dampak yang signifikan bagi keluarga miskin di kabupaten

⁴⁰ Wawancara dengan Dian Ratih Yuniatama, S.E ketua bidang fakmis, dilakukan pada Kamis 13 April 2023.

⁴¹ Wawancara dengan Ahmad Daroini Kordinator PKH pada Jumat, 15 April 2023.

ponorogo dan membantu meningkatkan kesejahteraan mereka melalui berbagai strategi yang efektif. Strategi Yang digunakan menurut kordinator PKH Antara lain :

1). .Mengadakan kampanye sosialisasi secara massal

Sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial P3A Ponorogo Melalui Kordinator PKH Antara lain dengan melibatkan para relawan PKH dan tokoh masyarakat setempat Seperti yang di jelaskan oleh Kordinator Pkh sebagai berikut

“Kampanye sosialisasi dilakukan dengan cara menyampaikan informasi tentang tujuan dan manfaat PKH secara terbuka dan transparan selanjutnya Kami sering mengadakan rapat dan pertemuan dengan masyarakat miskin di Kabupaten Ponorogo untuk memberikan informasi tentang PKH.

Selain itu, kami juga mendengarkan masukan dan saran dari masyarakat miskin untuk meningkatkan program PKH. Dengan menggunakan berbagai strategi komunikasi ini, kami berharap bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Ponorogo akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan memanfaatkan bantuan yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.⁴²

2). Optimalisasi Media Sosial

Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PKH melalui media sosial Seperti yang di jelaskan oleh Kordinator Pkh sebagai berikut :

“strategi yang digunakan bisa meliputi penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi PKH, seperti membuat akun media sosial resmi PKH Dinsos Ponorogo, mengadakan kampanye

⁴² wawancara dengan Ahmad Daroni Kordinator PKH, dilakukan pada Kamis 13 April 2023

online, membuat video atau infografis yang edukatif, atau mengadakan pertanyaan dan jawaban langsung melalui media sosial. Selain itu, dapat juga dilakukan kolaborasi dengan influencer atau komunitas online yang memiliki pengikut yang banyak untuk membantu mempromosikan program PKH⁴³

3). Penggunaan layanan pusat informasi

penggunaan layanan informasi adalah salah satu cara untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui strategi yang digunakan, informasi lebih lanjut diperlukan. Seperti yang di jelaskan oleh Humas dinsos yoan nata sebagai berikut:

"Kami berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang kami sediakan kepada masyarakat melalui Program Keluarga Harapan. Salah satu strategi yang kami terapkan adalah meningkatkan aksesibilitas informasi kepada masyarakat melalui media sosial dan website resmi kami. Kami juga memastikan bahwa informasi yang disajikan melalui media tersebut mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kami juga memperkuat komunikasi interpersonal dengan masyarakat melalui relawan dan petugas lapangan yang terlatih. Dengan cara ini, kami berharap dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat miskin di Kabupaten Ponorogo⁴⁴.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PKH menggunakan strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan tujuan PKH. Strategi komunikasi yang digunakan meliputi kampanye sosialisasi, media sosial, media konvensional, rapat dan pertemuan, serta layanan pusat informasi. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Indonesia, Program Keluarga Harapan (PKH) dan strategi komunikasi yang

⁴³ wawancara dengan Ahmad Daroni Kordinator PKH, dilakukan pada Kamis 13 April 2023

⁴⁴ wawancara dengan Ayodya yoan Humas Dinsos , dilakukan pada Kamis 13 April 2023

digunakan merupakan langkah penting dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama yang terpinggirkan dan membutuhkan bantuan sosial. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan tujuan PKH, diharapkan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dapat memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan bagi kesejahteraan keluarga miskin di Kabupaten Ponorogo

2. Bagaimana Hasil strategi komunikasi yang digunakan oleh Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat miskin dalam Program PKH

Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo sebagai penyelenggara program PKH bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program ini dengan baik dan efektif kepada masyarakat miskin di Ponorogo. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai Hasil strategi komunikasi yang digunakan oleh Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat miskin dalam Program PKH.

Menurut Ibu Dian Ratih Yuniatama, S.E selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dan Pemberdayaan Sosial Beliau Menerangkan Bagaimana Hasil Strategi Komunikasi yang digunakan dari program PKH bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sebagai berikut

“Kami telah melakukan beberapa strategi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui Program PKH di Kabupaten Ponorogo Pertama-tama, kami mengadakan pertemuan dengan para calon penerima manfaat untuk memberikan pemahaman tentang

program PKH dan manfaatnya. Kami juga memberikan informasi secara teratur melalui media sosial dan surat kabar lokal untuk memastikan bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Ponorogo memahami program PKH dan bagaimana mereka bisa memanfaatkannya. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan para relawan dan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa informasi tentang program PKH tersebar secara luas ke seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo. Kami juga mengadakan sesi sosialisasi dan pelatihan keterampilan untuk para calon penerima manfaat, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan dan potensi diri mereka”⁴⁵

Menurut Penjelasan dari kabid fakmis diatas strategi komunikasi yang dilakukan dinsos sangat positif. komunikanjuga menjelaskan peningkatan signifikan dalam partisipasi masyarakat miskin dalam program PKH, yang sangat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo juga memastikan bahwa seluruh masyarakat miskin dapat memanfaatkannya secara maksimal.

Hal itu juga disampaikan dengan Ahmad Daroni Kordinator PKH Antara lain :

“ sebagai Koordinator Pelaksana PKH Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo, sangat percaya bahwa komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam Program PKH. Pertama-tama, kami melakukan sosialisasi secara massal melalui berbagai media, seperti brosur, spanduk, dan poster yang tersebar di berbagai titik strategis di kabupaten Ponorogo. Kami juga menggunakan media sosial, seperti Facebook dan Instagram, untuk memperluas jangkauan sosialisasi kami “

Selain itu, Komunikaan juga menjelaskan bahwa beliau menerapkan pendekatan langsung dengan mengunjungi rumah-rumah masyarakat miskin untuk memberikan informasi dan memotivasi mereka untuk aktif dalam program PKH

⁴⁵ wawancara dengan Ahmad Daroni Kordinator PKH, dilakukan pada Kamis 13 April

“Kami memiliki beberapa strategi komunikasi yang digunakan dalam Program PKH, salah satunya adalah pendekatan langsung dengan mengunjungi rumah-rumah masyarakat miskin. Melalui pendekatan ini, kami dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin dan memotivasi mereka untuk aktif dalam program PKH. Selain itu, kami juga menggunakan media sosial dan brosur untuk menginformasikan program PKH kepada masyarakat.”⁴⁶

Selanjutnya peneliti Untuk membuktikan Hasil Dari Strategi yang digunakan oleh Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam Program PKH apakah telah sesuai harapan, maka peneliti mewawancarai beberapa Masyarakat penerima PKH. Berikut hasil wawancaranya

Menurut Responden 1 Sutrisno,40 Tahun Salah Satu Masyarakat Penerima PKH di ponorogo Beliau Mengungkapkan :

“ Ya, saya mengetahuinya. Informasi PKH dari Media Sosial yang ada Di media dinsos ponorogo,Tentu saja, program PKH membantu kami dalam kehidupan sehari-hari dan bantuan kesehatan, Saya merasa terbantu sekali dengan adanya program PKH, Saya berharap Dinas Sosial bisa memberikan informasi yang lebih jelas mengenai program PKH kepada masyarakat yang belum mengetahui program ini. Terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke media sosial atau tidak sering melihat pamflet yang disebar ”⁴⁷

Sama Halnya juga menurut ibu sri wahyuni 49 tahun Salah Satu Masyarakat Penerima PKH di ponorogo Beliau Mengungkapkan :

“ Tentu saja, program PKH sangat membantu saya dalam membiayai pendidikan anak saya. Selain itu, kami juga mendapat bantuan kesehatan seperti imunisasi dan periksa kesehatan, Saya berharap Dinas Sosial bisa memberikan informasi yang lebih jelas mengenai masa depan program PKH, terutama terkait kelanjutan

⁴⁶Wawancara dengan Ahmad Daroni Kordinator PKH, dilakukan pada Kamis 13 April

⁴⁷ Wawancara masyarakat penerima pkh pada jumat, 5 mei 2023

program ini. Sebagai penerima manfaat, kami ingin tahu apakah program PKH akan terus berlanjut di masa yang akan datang⁴⁸

Responden Ke 3 menurut Sumiati 45 tahun Juga mengungkapkan sebagai berikut :

“Ya, saya berharap Dinas Sosial bisa lebih aktif dalam memberikan informasi mengenai program PKH, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke media sosial atau yang tidak sering melihat pamflet yang disebar. Saya merasa tidak adil jika hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengetahui program ini. Saya sering berdagang di pasar dan tidak memiliki banyak waktu untuk mencari informasi mengenai program-program sosial. Selain itu, saya juga merasa sulit untuk memahami informasi yang terdapat pada pamflet yang disebar oleh Dinas Sosial, Saya sering berdagang di pasar dan tidak memiliki banyak waktu untuk mencari informasi mengenai program-program sosial. Selain itu, saya juga merasa sulit untuk memahami informasi yang terdapat pada pamflet yang disebar oleh Dinas Sosial “

Dari hasil wawancara dengan responden terlihat bahwa meskipun program PKH telah ada dan disebar melalui media sosial dan pamflet, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke media sosial atau tidak sering melihat pamflet. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial masih perlu meningkatkan strategi komunikasi dan sosialisasi program PKH agar dapat mencapai target sasarannya secara lebih efektif dan merata. Selain itu, informasi yang disampaikan perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, sehingga mudah dipahami dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

⁴⁸ Wawancara masyarakat penerima pkh pada jumat, 5 mei 2023

3. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Strategi Komunikasi Program PKH di Kabupaten Ponorogo?

Implementasi sebuah program bantuan sosial tidak bisa dipungkiri pasti akan mengalami beberapa Faktor pendukung dan faktor penghambat yang akan mempengaruhi Program Bantuan Sosial PKH di Kabupaten Ponorogo. yang dilakukan oleh Dinas Sosial Ponorogo dalam upaya mensejahterakan masyarakat miskin memang tidak mudah. Misalnya saja yang biasanya terjadi tentang penyalurannya. Hal yang sangat umum bahwa saat merealisasikan sebuah bantuan sosial kerap terjadi kesalahan target penerima yang menyebabkan penyaluran bantuan menjadi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa strategi komunikasi yang baik

Berdasarkan serangkaian wawancara dengan informan penelitian, disajikan data-data tentang Strategi Komunikasi yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dalam mensejahterakan masyarakat miskin di Kabupaten Ponorogo melalui PKH. Dalam implementasi PKH pihak Dinsos, P3A Kabupaten Ponorogo telah mengalami beberapa kendala diantaranya seperti yang dijelaskan Ibu Dian Ratih Yuniatama, S.E Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dan Pemberdayaan Sosial sebagai berikut :

“Sejauh ini, kami melihat ada beberapa faktor pendukung yang membantu kelancaran Program PKH di Kabupaten Ponorogo. Pertama-tama, dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial, sangat penting dalam menjalankan program ini. Selain itu, adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak, seperti pendamping PKH, perangkat desa, dan stakeholder lainnya,

juga menjadi faktor pendukung yang membantu kelancaran program ini”⁴⁹

Namun demikian, ada juga faktor-faktor penghambat yang kami lihat.

Salah satunya adalah :

“ Hambatan seringkali muncul dari masyarakat yang tidak menerima bahwa seseorang menjadi penerima program PKH. Alasan di balik hal ini mungkin karena ada KPM lain yang masih menerima program meskipun dianggap sudah mampu secara finansial. Kondisi seperti ini seringkali menjadi sorotan masyarakat. Ada kasus di mana KPM yang sebelumnya tidak mampu, namun setelah menerima program, kehidupannya menjadi lebih layak dan lebih baik, sehingga menjadi sorotan bagi masyarakat. Di sisi lain, ada juga kasus di mana masyarakat non-KPM menjadi sorotan karena salah satu KPM terlihat mampu meskipun sebenarnya ia mendapat warisan atau bantuan dari anak mantunya dan sejenisnya.”

Peneliti juga mendapat keterangan yang sama dari informan lain, yakni seperti yang dikatakan oleh Ahmad Daroini selaku Operator PKH Dinas Sosial Ponorogo berikut ini:

“Saya pikir di Ponorogo, situasinya relative karena masyarakatnya cenderung kondusif. Hingga saat ini, keluhan yang kami terima adalah tentang ketidakmenerimaan dalam program PKH. Ada 2 kemungkinan mengapa hal ini terjadi. Pertama, mereka tidak terdaftar dalam DTKS. Kedua, meskipun mereka terdaftar dalam DTKS, namun mereka tidak termasuk dalam golongan Desil penerima PKH. Desil adalah tingkatan ekonomi yang terdiri dari beberapa klaster dalam DTKS, dan penerima PKH hanya terdapat pada golongan klaster atau desil 4 ke bawah. Oleh karena itu, yang termasuk dalam desil di atas 4 tidak dapat menerima PKH. Faktor yang memengaruhi tingkat desil tergantung pada pembaruan data dari setiap desa”

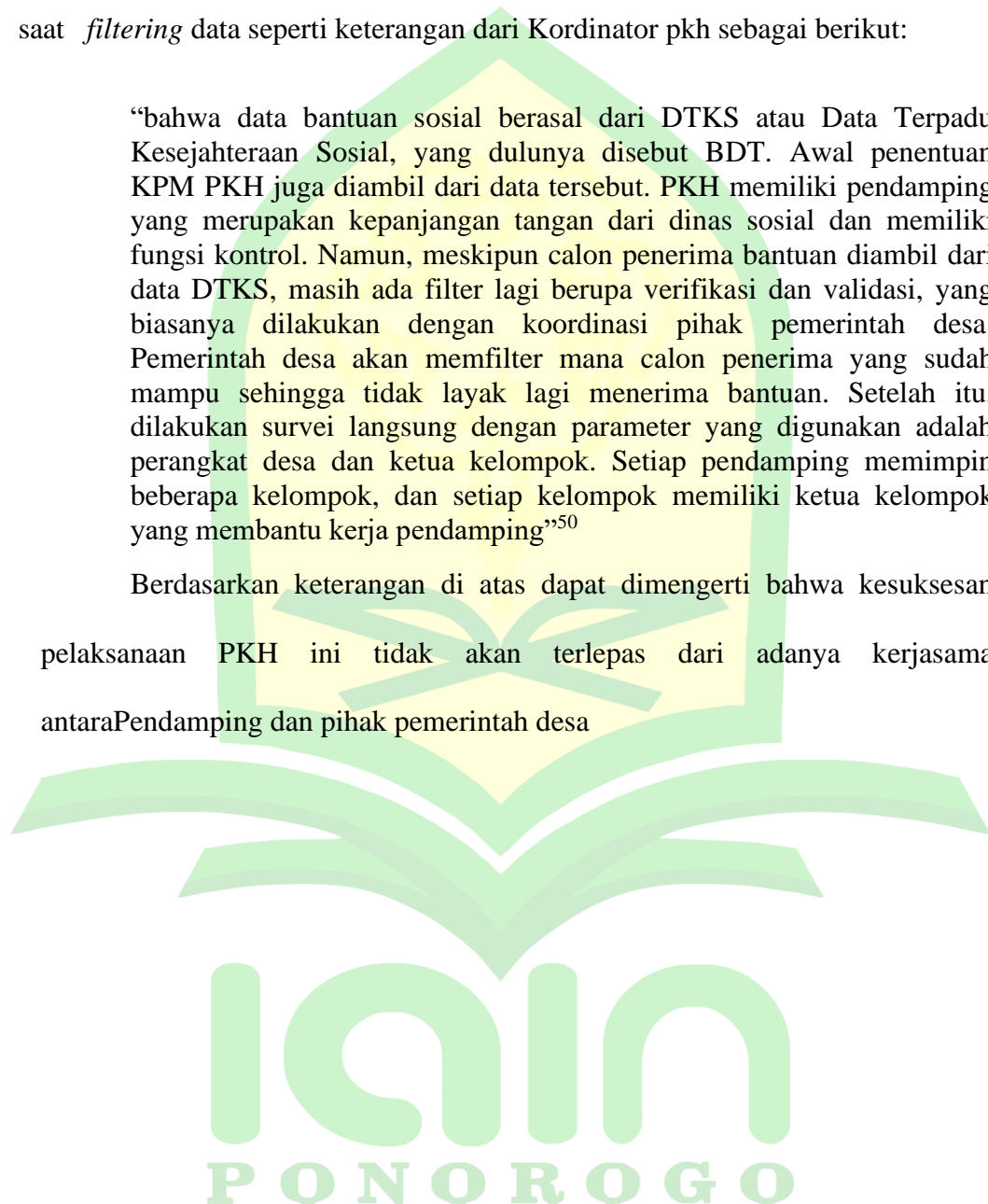
Sebenarnya dalam pelaksanaan PKH pihak Dinas Sosial Ponorogo sudah sangat berhati-hati dalam menyalurkan PKH, namun kita tidak bisa memungkiri

⁴⁹ Wawancara dengan Dian Ratih Yuniatama, S.E ketua bidang fakmis, dilakukan pada Kamis 13 April 2023

bahwa dari sekian ribu calon penerima PKH ada yang lolos dari pengawasan pihak Dinas Sosial. Kehati-hatian Dinas Sosial Ponorogo ini bisa kita lihat dari caramereka melakukan penyeleksian dengan bersinergi bersama pemerintah desa saat *filtering* data seperti keterangan dari Kordinator pkh sebagai berikut:

“bahwa data bantuan sosial berasal dari DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang dulunya disebut BDT. Awal penentuan KPM PKH juga diambil dari data tersebut. PKH memiliki pendamping yang merupakan kepanjangan tangan dari dinas sosial dan memiliki fungsi kontrol. Namun, meskipun calon penerima bantuan diambil dari data DTKS, masih ada filter lagi berupa verifikasi dan validasi, yang biasanya dilakukan dengan koordinasi pihak pemerintah desa. Pemerintah desa akan memfilter mana calon penerima yang sudah mampu sehingga tidak layak lagi menerima bantuan. Setelah itu, dilakukan survei langsung dengan parameter yang digunakan adalah perangkat desa dan ketua kelompok. Setiap pendamping memimpin beberapa kelompok, dan setiap kelompok memiliki ketua kelompok yang membantu kerja pendamping”⁵⁰

Berdasarkan keterangan di atas dapat dimengerti bahwa kesuksesan pelaksanaan PKH ini tidak akan terlepas dari adanya kerjasama antaraPendamping dan pihak pemerintah desa



⁵⁰ Wawancara dengan Ahmad Daroni Kordinator PKH, dilakukan pada Kamis 13 April

BAB VI

ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI DINAS SOSIAL,P3A KABUPATEN PONOROGO DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

A. Analisis Bentuk strategi komunikasi Dinsos,P3A Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

Strategi Komunikasi Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinsos,P3A) Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Salah satu program yang dicanangkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dengan memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin. Oleh karena itu, strategi komunikasi perlu disusun sedemikian rupa agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Di bab III telah dipaparkan mengenai Bentuk strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial,Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinsos,P3A) Kabupaten Ponorogo strategi komunikasi terdiri dari 5 Faktor yang harus diperhatikan Dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat miskin, Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo juga menerapkan langkah-langkah yang sesuai dengan empat elemen tersebut, sebagai berikut:

1. Pengenalan Khalayak

Dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, strategi komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sasaran dalam program tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh komunikator adalah mengenali khalayak atau komunikan. Dalam hal ini, Bidang Fakmis, Tim Koordinator Kabupaten Pelaksana PKH, dan pendamping yang semuanya berada di bawah kendali Dinas Sosial Ponorogo menjadi komunikator, sedangkan Penerima Bantuan Sosial PKH menjadi komunikan.

Dalam merancang strategi komunikasi yang efektif, Badan Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Kabupaten Ponorogo dapat memanfaatkan media massa untuk mensosialisasikan program PKH, memberikan pelatihan kepada relawan, petugas lapangan, dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan pemberdayaan mereka. Namun, strategi komunikasi tersebut harus dilakukan dengan pendekatan terpadu dengan program lain dan akses ke media sosial serta media massa oleh masyarakat miskin juga harus diperhatikan.

Menurut Analisis Peneliti Meskipun strategi komunikasi tersebut efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PKH, namun masih belum cukup untuk mengatasi kemiskinan secara keseluruhan. Namun, program PKH telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Kabupaten Ponorogo melalui bantuan tunai dan nontunai, termasuk bantuan pendidikan, kesehatan, dan gizi. Strategi komunikasi yang efektif dapat digunakan untuk memastikan efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ponorogo.

2. Penyusunan Pesan

Sesuai dengan paparan data peneliti di bab III, Langkah selanjutnya dalam strategi komunikasi adalah penyusunan pesan. Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo harus menetapkan apa saja yang akan disampaikan kepada khalayak dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui program PKH

Pesan yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam Program Keluarga Harapan (PKH) adalah melalui strategi komunikasi yang tepat. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos, P3A) Kabupaten Ponorogo memahami bahwa strategi komunikasi yang efektif sangat penting dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PKH.

Salah satu bentuk strategi yang dapat diterapkan adalah melalui sosialisasi PKH melalui media massa. Media massa seperti iklan, talkshow, dan publikasi artikel dapat menarik perhatian masyarakat dan meningkatkan pemahaman mereka mengenai manfaat dan prosedur PKH. Selain itu, Dinsos, P3A Kabupaten Ponorogo juga memberikan pelatihan kepada para relawan, petugas lapangan, dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program PKH mengenai keterampilan komunikasi dan pemberdayaan.

Meskipun pesan yang digunakan sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PKH, namun strategi ini tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan akses masyarakat terhadap media sosial dan media massa. Pelatihan keterampilan komunikasi dan pemberdayaan juga harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat dan terintegrasi dengan program-program lainnya.

3. Menetapkan Metode

Setelah memahami khalayak dan merancang pesan yang sesuai, langkah selanjutnya dalam strategi komunikasi adalah menentukan metode yang tepat untuk menyampaikan pesan dan memperhatikan situasi dan kondisi dari komunikannya dalam strategi komunikasi penyampaian, cara pelaksanaannya menggunakan metode *canalizing* dimana memengaruhi khalayak untuk menerima pesan yang disampaikan, kemudian secara

perlahan-lahan merubah sikap dan pola pemikirannya ke arah yang dikehendaki metode informatif dan metode edukatif dapat digunakan dalam strategi komunikasi Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Strategi yang digunakan adalah dengan mengadakan kampanye sosialisasi secara massal melalui para relawan PKH dan tokoh masyarakat setempat, serta melakukan optimalisasi media sosial untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PKH. Bantuan yang diberikan melalui PKH memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Kabupaten Ponorogo

4. Pemilihan Media Komunikasi

Sesuai dengan paparan data peneliti di bab III Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo Menggunakan Media komunikasi merupakan sarana yang dapat mempermudah seorang komunikator dalam menyampaikan sebuah pesan. Oleh karena itu pemilihan media komunikasi yang tepat sangatlah penting. Dalam hal ini Dinas Sosial menggunakan media komunikasi *instagram dan website pelayanan informasi* sebagai alat penghubung dengan Masyarakat ponorogo untuk berkomunikasi dengan komuniikan dalam jangkauan yang lebih luas.

5 Peranan Komunikator.

Komunikator merupakan komponen paling penting dalam komunikasi. Karena komunikator adalah orang yang berperan penting mengenai kemana arah komunikasi yang akan dibawa. Dalam sebuah strategi komunikasi seorang komunikator harus memiliki daya tarik dan kredibilitas untuk memberikan efek kepada khalayak dengan berbagai bentuk perubahan-perubahan baik perilaku. Salah satu strategi yang digunakan adalah sosialisasi PKH melalui media massa atau publikasi artikel yang menarik perhatian masyarakat. Dalam hal ini, komunikator berperan dalam merancang dan menyampaikan pesan yang efektif untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PKH.

Selain itu, Dinsos, P3A Kabupaten Ponorogo memberikan pelatihan kepada para relawan, petugas lapangan, dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program PKH mengenai keterampilan komunikasi dan pemberdayaan. Dalam hal ini, komunikator berperan dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan prosedur PKH serta meningkatkan keterampilan komunikasi dan pemberdayaan pada target sasaran. program Keluarga Harapan (PKH) juga memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PKH. Dalam hal ini, komunikator berperan dalam merancang konten edukatif dan kampanye

online yang menarik serta berkolaborasi dengan influencer atau komunitas online yang memiliki pengikut yang banyak.

peran komunikator sangat penting dalam merancang strategi komunikasi yang efektif dalam program PKH. Komunikator harus mampu menyampaikan pesan yang efektif melalui berbagai media komunikasi, memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan pemberdayaan, dan merancang konten edukatif dan kampanye online yang menarik untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PKH.

B. Analisis Hasil strategi komunikasi yang digunakan oleh Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat miskin dalam Program PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial secara berkala. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam program PKH. Dalam konteks Kabupaten Ponorogo, Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo telah menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui program PKH.

Strategi-strategi tersebut Di bab III telah dipaparkan meliputi Antara Lain mencakup pertemuan dengan calon penerima manfaat, memberikan informasi rutin melalui media sosial dan surat kabar lokal, bekerja sama dengan relawan dan pihak terkait untuk menyebarkan informasi, serta memberikan sosialisasi dan pelatihan keterampilan bagi calon penerima manfaat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hasil strategi komunikasi yang digunakan oleh Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui program PKH dengan menggunakan teori kesejahteraan sosial dan teori kemiskinan

Dalam teori kesejahteraan sosial menurut kemensos, strategi komunikasi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam program PKH. Hasil dari strategi komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam partisipasi masyarakat miskin dalam Program PKH. Masyarakat penerima PKH merasakan manfaat dari program tersebut, seperti bantuan dalam kehidupan sehari-hari dan kesehatan. Namun, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui secara detail tentang program ini, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke media sosial atau tidak sering melihat pamflet yang disebar.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi yang telah diterapkan oleh Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam Program PKH. Namun, masih diperlukan upaya untuk memperluas jangkauan sosialisasi, terutama kepada masyarakat yang belum mengetahui program ini atau tidak memiliki akses ke media sosial. Selain itu, informasi yang disampaikan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam teori kemiskinan, strategi komunikasi yang dilakukan dapat membantu dalam mengatasi beberapa faktor penyebab kemiskinan, seperti ketidakmampuan dalam memanfaatkan peluang, kurangnya informasi, serta minimnya keterampilan. Dengan adanya informasi dan pelatihan yang disampaikan melalui strategi komunikasi yang dilakukan, masyarakat miskin diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Data untuk penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Pihak Terkait Antara Lain Kabid Fakmis, Koordinator PKH, dan tiga penerima manfaat program PKH di Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam program PKH.

Pertemuan dengan calon penerima manfaat dan sosialisasi melalui media sosial dan surat kabar lokal dianggap efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai program tersebut. Selain itu, kerja sama dengan relawan dan pihak terkait juga memperluas jangkauan informasi mengenai program PKH.

Namun, terdapat juga temuan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang kurang mendapatkan informasi secara jelas mengenai program PKH, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke media sosial atau tidak sering melihat informasi yang dibagikan. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan strategi komunikasi yang sudah ada, serta mencari alternatif strategi komunikasi yang dapat mencapai masyarakat yang belum terjangkau.

Kesimpulannya, strategi komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program PKH dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk terus meningkatkan dan memperbaiki strategi komunikasi yang digunakan dalam program PKH, serta memperluas jangkauan informasi agar lebih banyak masyarakat yang dapat dijangkau dan mendapatkan manfaat dari program tersebut

C. Analisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Strategi Komunikasi Program PKH di Kabupaten Ponorogo

Implementasi program bantuan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat miskin di Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa program bantuan sosial seringkali menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya. Hal ini terjadi tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat kabupaten atau daerah.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang melaksanakan program bantuan sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan sosial yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Ponorogo menghadapi beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi kelancaran program PKH di Kabupaten Ponorogo. Salah satu faktor pendukung adalah dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial, yang sangat penting dalam menjalankan program ini. Selain itu, adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak, seperti pendamping PKH, perangkat desa, dan stakeholder lainnya, juga menjadi faktor pendukung yang membantu kelancaran program ini.

Namun, di sisi lain, ada juga faktor-faktor penghambat yang dapat mempersulit pelaksanaan program PKH di Kabupaten Ponorogo. Salah satu faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Sosial Ponorogo adalah ketidakmenerimaan masyarakat terhadap program PKH. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakmengertian masyarakat tentang program PKH atau mungkin karena mereka tidak terdaftar dalam DTKS atau tidak termasuk dalam golongan Desil penerima PKH.

Meskipun Dinas Sosial Ponorogo telah berhati-hati dalam menyalurkan bantuan PKH dengan melakukan penyeleksian melalui DTKS dan verifikasi serta validasi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa calon penerima bantuan yang lolos dari pengawasan pihak Dinas Sosial. Oleh karena itu, Dinas Sosial Ponorogo membutuhkan strategi komunikasi yang baik untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan memperbaiki pelaksanaan program PKH agar lebih efektif dan efisien dalam mensejahterakan masyarakat miskin di Kabupaten Ponorogo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo memiliki strategi komunikasi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui program PKH. Strategi ini melibatkan langkah-langkah seperti pengenalan khalayak, penyusunan pesan, menetapkan metode komunikasi yang tepat, pemilihan media komunikasi yang sesuai, dan peran komunikator yang penting. Strategi komunikasi yang efektif melibatkan sosialisasi melalui media massa, pelatihan keterampilan komunikasi, dan pendekatan terpadu dengan program lain serta akses media sosial.
2. Hasil strategi komunikasi yang digunakan oleh Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat miskin dalam Program PKH strategi komunikasi yang digunakan oleh Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo dalam program PKH telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dan kesejahteraan mereka melalui pertemuan dengan calon penerima manfaat, sosialisasi melalui media sosial serta kerja sama dengan relawan dan pihak terkait. Meskipun begitu, masih ada sebagian masyarakat yang belum terjangkau dan kurang mendapatkan informasi secara jelas tentang program PKH,

sehingga perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan strategi komunikasi yang sudah ada serta mencari alternatif strategi komunikasi yang dapat mencapai masyarakat yang belum terjangkau.

3. faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi strategi komunikasi Program PKH di Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo. Faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan program PKH di Kabupaten Ponorogo adalah dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial, kerjasama yang baik antara berbagai pihak seperti pendamping PKH, perangkat desa, dan stakeholder lainnya. Faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan program PKH di Kabupaten Ponorogo adalah ketidakmenerimaan masyarakat terhadap program PKH, calon penerima bantuan yang lolos dari pengawasan pihak Dinas Sosial Ponorogo, dan ketidaktahuan masyarakat tentang program PKH.

B. Saran

1. Bagi Dinsos, P3A Kabupaten Ponorogo

Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo perlu mengoptimalkan strategi komunikasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) guna mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Dalam hal ini, perlu dilakukan pengenalan khalayak,

penyusunan pesan yang efektif, pemanfaatan media massa, pelatihan, dan evaluasi program secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin

2. Bagi peneliti selanjutnya

Saran untuk peneliti berikutnya adalah bahwa penelitian berjudul "strategi komunikasi Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan "ini masih jauh dari kesempurnaan dan memerlukan banyak perbaikan dari berbagai perspektif yang berbeda. Ada kemungkinan bahwa masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan sebagai akibat dari keterbatasan waktu, sumber referensi, metode, dan pengetahuan serta analisis yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengadopsi sudut pandang komunikasi yang berbeda dan mampu menyajikan hasil penelitian dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ali Nurdin. 2015. Komunikasi Magis, Fenomena Dukun di Pedesaan. Lkis Pelangi Aksara.
- Andi Nurhikmawati. 2015. Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Tamangapa Kecamatan Menggala. UIN Alauddin Makassar.
- Anisa Dwi Utami. 2017. Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dalam Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Gayam. Universitas Sahid Surakarta.
- Anwar Arifin. 1984. Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas. CV. Armico.
- Anwar Arifin. 1989. Strategi Komunikasi. Bandung: PT Armico.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Laporan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. Badan Pusat Statistik Ponorogo.
- Burhan Bungin. 2005. Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press.
- Cangara. Perencanaan dan Strategi Komunikasi. 61.

Chriswardani Suryawati. 2004. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah.

Dr. Sigit Hermawan S.E. 2021. Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. MNC Publishing.

[https://www.kemensos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage
&pid=1537](https://www.kemensos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1537)

Kementerian Sosial RI. Panduan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)2019

Kementerian Sosial RI. (2023). Program Keluarga Harapan (PKH).

Kementerian Sosial Republik Indonesia, Tujuan Program Keluarga Harapan,(2020)

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Kementerian Sosial RI. (2023). Program Keluarga Harapan (PKH).

Kementerian Sosial Republik Indonesia, Tujuan Program Keluarga Harapan,(2020)

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Bandung: Alfab